

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan analisa pada bab IV, penulis menyimpulkan bahwa definisi rumah apung tidak dapat masuk dalam definisi bangunan sebagai objek PBBPP dan tidak dikenakan PBBPP, yang seharusnya dapat dikenakan PBBPP. Namun karena terdapat penyimpangan, secara kongkrit keberadaan rumah apung ada di masyarakat, namun peraturan yang ada belum mengaturnya.
2. Dari segi keadilan, untuk rumah apung yang menggunakan sistem pengapung, karena tidak masuk sebagai objek PBBPP, muncul ketidakadilan yang diperkuat dengan teori Adam Smith, sila kelima Pancasila, dan teori John Rawls.
3. Rumah apung yang tidak dapat dimasukkan dalam definisi bangunan sebagai objek PBBPP juga dapat dilakukan penemuan hukum dengan cara penafsiran hukum dengan cara sosiologis. Namun karena pada saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai rumah apung, padahal secara kongkrit ada keberadaan rumah apung, maka menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak.

## **B. Saran**

1. Dari analisis yang telah dilakukan mengenai rumah apung yang dikaitkan dengan UU PDRD, penulis memberi saran kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan lagi mengenai hukum perpajakan yang ada di Indonesia. Jika pada objek PBB, Pemerintah hendaknya tidak mengabaikan fakta-fakta tentang keanekaragaman bangunan di nusantara. Karena jika dilihat dari sejarahnya, rumah apung di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, melainkan salah satu dari kekayaan yang Indonesia miliki bahkan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Dalam hal ini Pemerintah hendaknya lebih jeli melihat perkembangan dunia perdagangan yang semakin dinamis. Bangunan apung saat ini dilirik oleh pelaku usaha sebagai variasi menjalankan usaha bisnis, misalnya restoran apung komersial, dan objek wisata komersil.
2. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mengkaji ulang UU PDRD terutama pada PBBPP. Pengkajian ulang dimaksudkan agar rumah apung dapat masuk sebagai objek PBBPP dengan cara menambah peraturan terkait atau memberikan penjelasan lebih rinci mengenai hal tersebut, yang sebelumnya telah disebutkan bahwa rumah apung tidak masuk dalam objek PBBPP. Selain pengkajian terhadap UU PDRD, sebaiknya pengaturan PBBPP mengenai rumah apung diatur juga dalam Peraturan Daerah (Perda) dimana rumah apung berada, mengingat bahwa PBBPP merupakan salah satu sumber APBD. Dengan pengkajian terhadap UU PDRD dan pengaturan di Peraturan Daerah dapat memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak. Memberikan kepastian hukum pada wajib pajak secara tidak langsung akan mencegah kekosongan hukum terjadi.
3. Pemerintah juga dinilai penting untuk melakukan penelitian mengenai hal-hal baru apa saja yang ada dilapangan. Penelitian lapangan bertujuan agar pemerintah tidak tertinggal dari kemajuan zaman yang semakin pesat. Perkembangan zaman yang semakin pesat akan memunculkan suatu hal yang baru. Sesuatu hal yang baru tersebut memiliki kemungkinan terjadi

kekosongan hukum. Walaupun di Indonesia, rumah apung bukanlah hal baru, namun di negara-negara Eropa, seperti Belanda, baru mulai menggunakan rumah apung. Rumah apung dianggap sebagai salah satu solusi banjir dan perubahan iklim yang dapat menyebabkan meningkatnya permukaan air laut yang sewaktu-waktu dapat terjadi.<sup>81</sup> Mengingat Indonesia adalah negara maritim, tidak menutup kemungkinan banjir dan perubahan iklim yang menyebabkan meningkatnya permukaan air laut juga dapat terjadi. Apabila rumah apung mulai semakin banyak diminati dan digunakan sebagai hunian masyarakat, tetapi belum ada pengaturan mengenai rumah apung tersebut akan menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak.

---

<sup>81</sup> *Rumah Apung, Cara Belanda Atasi Perubahan Iklim*, <http://www.dw.com/id/rumah-apung-cara-belanda-atasi-perubahan-iklim/a-17533962>, diakses terakhir pada 4 April 2017, pukul 15.11

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BAHAN HUKUM

- Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1977
- Andreas Doweng B, Bartolomeus S, et.al, *Pendidikan Nilai Pancasila*, Unpar Press, Cetakan Pertama, Bandung 2007
- Bismar Siregar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1986
- Christian Pelras, *Manusia Bugis*, Nalar, Cetakan pertama, Jakarta, 2006
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Daniel.L., *Struktur*, Reflika Aditama, Bandung, 1998
- Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Penyuluhan Pelayanan Dan Humas, *KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Elly Erawaty, *Pedoman Penulisan Esai Akademik*, Refika Aditama, Cetakan pertama, Bandung, 2012
- Johannes Gunawan, *Teknik Penulisan Ilmiah*, 2010
- John Rawls, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2006
- Oyok Abuyamin, *Perpajakan*, Mega Rancage Press, Cetakan 1, Bandung, 2016
- \_\_\_\_\_, *Perpajakan Pusat dan Daerah*, Humaniora, Bandung, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cetakan ke-21, Refika Aditama, Bandung, 2008
- R. Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Cetakan ke-1, PT. Eresco, Bandung, 1992
- \_\_\_\_\_, *Asas dan Dasar Perpajakan 2*, Cetakan ke-1, PT. Eresco, Bandung, 1992
- \_\_\_\_\_, *Pajak Bumi Dan Bangunan*, Cetakan ke-2, PT. Eresco, Bandung, 1986
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Cetakan ketiga, PT.Eresco, Bandung, 1992
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UI Press, 1986
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982
- Tulis S. Meliala, *Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Materai*, Ekonomi, Cetakan Pertama, Bandung 1994

\_\_\_\_\_, *Perpajakan Dalam Teori Dan Praktek*, Yrama Widya Dharma, Cetakan pertama, Bandung, 1991

Mohammad Ali Mansyur, Ma'moen Abdullah, *Arsitektur Tradisional Daerah Sumatra Selatan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah*, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1990/ 1991

M. Zaid Wahyudi, et.al., *Jelajah Musi Eksotika Sungai Di Ujung Senja Laporan Jurnalistik Kompas*, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm 215, (terakhir diakses 13 Februari 201, pkl 20.15)

Mochtar Kusumaatmadja, Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung*, cetakan ke-2, 2009

Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, PT. Alumni, Bandung, Cetakan ke-2, 2008

Y.Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, Cetakan pertama, 2002

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. *Undang Undang R.I., No. 12 Tahun 1985, Pajak Bumi dan Bangunan, L.N.R.I. Tahun 1985 No. 68*

Indonesia. *Undang Undang R.I., No. 12 Tahun 1994, Perubahan Atas Undang Undang No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, L.N.R.I. Tahun 1994 No. 62*

Indonesia. *Undang-Undang R.I., No. 28 Tahun 2002, Bangunan Gedung, L.N.R.I. Tahun 2002 Nomor 134.*

Indonesia. *Undang-Undang R.I., No. 28 Tahun 2009, Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, L.N.R.I Tahun 2009 No. 130, T.L.N.R.I No. 5049.*

Indonesia. *Undang-Undang R.I., No. 1 Tahun 2011, Perumahan dan Pemukiman, L.N.R.I Tahun 2011 No. 7, T.L.N.R.I 5188*

Indonesia. *Undang-Undang R.I., No. 28 Tahun 2002, Bangunan Gedung, L.N.R.I Tahun 2002 No. 134, T.L.N.R.I 4247*

Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan

## **C. JURNAL**

Dan Fianca, et al., *Studi Eksperimen Material GRC ( Glassfiber Reinforces Concrete) Sebagai Bahan Dasar Pada Modular Floating Pontoon*, Jurnal Teknik Perkapalan- Vol.3, No.4 Oktober 2015 [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=441650&val=4688&title=STUDI%20EKSPERIMEN%20MATERIAL%20GRC%20\(GLASSFIBER%20REINFORCED%20CONCRETE\)%20SEBAGAI%20BAHAN%20DASAR%20PAD A%20MODULAR%20FLOATING%20PONTOON](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=441650&val=4688&title=STUDI%20EKSPERIMEN%20MATERIAL%20GRC%20(GLASSFIBER%20REINFORCED%20CONCRETE)%20SEBAGAI%20BAHAN%20DASAR%20PAD A%20MODULAR%20FLOATING%20PONTOON), terakhir diakses pada 3 April 2017, pkl 21.19

Karina Mayasari, et.al., *Efektivitas Pengawetan Bambu Untuk Bahan Material Rumah Apung Danau Tempe di Sulawesi Selatan*, Jurnal Permukiman Vol. 10 No. 2 November 2015 : 118-129, (<http://jurnal.permukiman.pu.go.id/index.php/JP/article/view/8> terakhir diakses 10 Januari 2017, pkl 17.29)

Karyadi Kusliansjah, *RAFTA 2011, Model Inovasi Perancangan Arsitektus Pada Daerah Kritis Banjir Tepian Sungai Di Indonesia*, Seminar Nasional dan Pameran 2011, Kebijakan dan Strategi Pengadaan Perumahan Berkelanjutan Di Indonesia

M.Aulia, *Pelestarian Rumah Lanting Berlandaskan Budaya Sungai Masyarakat Kota Banjarmasin*, E-Journal Graduate Unpar Vol.1, No.2 Tahun 2014: 2355-4274, (<http://journal.unpar.ac.id/index.php/unpargraduate/article/download/1054/1193> terakhir diakses 11 Januari 2017, pkl 13.40)

Rizal Mustansyir, *Kearifan Dan Kendala Lokal Warga Lanting Sebagai Penghuni Pinggiran Sungai Sambas Di Kalimantan Barat*, Prosiding The 5th International Conference in Indonesian Studies: Ethnicity and Globalization”

Septana Bagus Pribadi, et.al., *Sistem Konstruksi Bangunan Sederhana Pada Perbaikan Rumah Warga Di Daerah ROB*, Modul, Volume 11 Tahun 2011, pada 83, 2011. ([http://eprints.undip.ac.id/32473/1/4.sistem\\_konstruksi\\_bangunan\\_sederhana\\_pada\\_daerah\\_Rob.pdf](http://eprints.undip.ac.id/32473/1/4.sistem_konstruksi_bangunan_sederhana_pada_daerah_Rob.pdf), terakhir diakses 28 November 2016 pkl 20.31)

#### D. HALAMAN INTERNET

Ahadi, *Kegunaan Rumah Tinggal*, <http://www.bangurumah.com/kegunaan-rumah-tinggal>, (terakhir diakses 9 Februari 2017, pkl 22.30)

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016 (<http://kbbi.web.id/rumah>, terakhir diakses 16 Desember 2016).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016. (<http://kbbi.web.id/lekat>, terakhir diakses 28 November 2016)

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kalimantan Selatan, *Kalimantan Selatan- Kondisi Geografis*, <http://bkpmd.kalselprov.go.id/index.php/profil/kalsel/kondisi-geografis>, terakhir diakses 23 Februari 2017, pkl. 9.34)

Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, *Rumah Rakit (Rumah Tradisional Palembang)*, 2016 ([melayuonline.com/ind/culture/dig/1860](http://melayuonline.com/ind/culture/dig/1860), terakhir diakses 9 November 2016)

Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, *Rumah Lanting, Rumah Terapung Di Kalimantan Selatan*, (<http://melayuonline.com/ind/culture/dig/1924/rumah-lanting> terakhir diakses 10 Desember 2016)

Ilmu Pengetahuan, *Kebutuhan Hidup Ekonomi Manusia Kebutuhan Primer, Sekunder, Tersier, Jasmani, Rohani Sekarang Masa Depan Pribadi*

*dan , Sosial*, (<http://www.organisasi.org/1970/01/kebutuhan-hidup-ekonomi-manusia-kebutuhan-primer-sekunder-tersier-jasmani-rohani-sekarang-masa-depan-pribadi-dan-sosial.html>) terakhir diakses 8 Februari 2017, pkl. 20.34).

*Mencoba Resto Apung di Kintamani*, (<http://bali.panduanwisata.id/restaurants/mencoba-resto-apung-di-kintamani/>), terakhir diakses pada 4 April 2017, pkl 21.42)

Muhammad Aulia, *Pelestarian Rumah Laanting Berlandaskan Budaya Sungai Masyarakat Kota Banjarmasin*, (<http://journal.unpar.ac.id/index.php/unpargraduate/article/view/1054>) terakhir diakses 22 Februari 2017, pkl. 14.37)

Noviar, *Rumah Rakit*, (<http://www.palembangdalamsketsa.com/2016/11/rumah-rakit-palembang.html>), terakhir diakses 15 Februari pkl. 14.14)

*Pemulung Sungai*, (<http://www.antarakalsel.com/foto/2480/pemulung-sungai>), terakhir diakses 7 Maret 2017, pkl. 20.03)

Prima Convex, *Warga Tambak Lorok Resmi Miliki Perpustakaan Apung Pertama di Indonesia* (<http://primaconvex.com/warga-tambak-lorok-resmi-miliki-perpustakaan-apung-pertama-di-Indonesia/>), terakhir diakses 7 Maret 2017, pkl. 13.49)

Richard Fisher, *Rumah Apung Sebagai Jawaban Atas Krisis Rumah Perkotaan, 2016* ([http://www.bbc.com/indonesia/vert\\_aut/2016/06/160618\\_vert\\_aut\\_rumah](http://www.bbc.com/indonesia/vert_aut/2016/06/160618_vert_aut_rumah)), terakhir diakses 19 November 2016)

*Rumah Apung, Cara Belanda Atasi Perubahan Iklim*, (<http://www.dw.com/id/rumah-apung-cara-belanda-atasi-perubahan-iklim/a-17533962>), diakses terakhir pada 4 April 2017, pukul 15.11)

Sri Rejeki, *Terapung di Ujung Senja*, (<http://travel.kompas.com/read/2014/07/04/1003240/Terapung.di.Ujung.Senja>) terakhir diakses 8 Maret 2017, pkl. 21.29)

Wira Tour Travel Bali, *Resto Apung Kintamani*, 2014. (<http://www.water-sport-bali.com/resto-apung-kintamani/>), terakhir diakses 9 November 2016)

#### **E. SUMBER LISAN**

Wawancara dengan Ir. Karyadi Kusliansjah, MT., IAI, Dosen Arsitektur Universitas Katolik Parahyangan, di Bandung (24 Mei 2017)

Wawancara Ibu Tuty bagian Pelaksana Dinas Pendapatan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung, di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung (14 Juni 2017)

Wawancara Bapak Donatus Mulyono bagian Auditor di Kantor Pemeriksaan Pajak, di Bandung (29 Mei 2017)